

d

# **PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode Semester II Per 31 Desember Tahun 2020**  
**DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI**

Jl. Veteran No. 273

Surakarta - Jawa Tengah 57155

Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

**Untuk Periode Semester II per 31 Desember 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Veteran No. 273**

**Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643**

**Surakarta - Jawa Tengah 57155**

**e-mail : pasurakarta@yahoo.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Surakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Surakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 31 Desember 2020



Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretaris

Bambang Sutiyo, S.H.

NIP.19830323 198603 1 003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca .....	6
III. Laporan Operasional .....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	12
A. Penjelasan Umum .....	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Surakarta.....	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
A.4. Basis Akuntansi .....	14
A.5. Dasar Pengukuran .....	14
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	21
B.2. Belanja.....	21

# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 .....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2020 dan 2018 .....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang.....	18
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	19
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Des TA 2020 .....	20
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Des TA 2020 dan 2019.....	21
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Des TA 2020.....	21
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Des TA 2020.....	22
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Des TA 2020 dan TA 2019.....	22
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Des TA 2020 dan TA 2019.....	23
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Des TA 2020 dan TA 2019.....	24
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 31 Des TA 2020 dan TA 2019.....	25
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Des 2020 dan 2020 .....	26
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	26
Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	27
Tabel 16 Rincian Persediaan per 31 Des TA 2020 dan 31 Desember 2019.....	28
Tabel 17 Rincian Aset Tetap.....	29
Tabel 18 Rincian Saldo Tanah.....	29
Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	33
Tabel 20 Rincian Aset Lainnya.....	34
Tabel 21 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Des 2020 dan 2019.....	35
Tabel 22 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Des 2020 dan TA 2019.....	36
Tabel 23 Rincian Beban Pegawai per 31 Des 2020 dan TA 2019 .....	37
Tabel 24 Rincian Beban Persediaan per 31 Des 2020 dan TA 2020 .....	38
Tabel 25 Rincian Beban Jasa per 31 Des 2020 dan TA 2019 .....	38
Tabel 26 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Des 2020 dan TA 2019 .....	39
Tabel 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Des 2020 dan TA 2019 .....	39
Tabel 28 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Des 2020 dan TA 2019.....	40
Tabel 29 Rincian Kegiatan Non Operasional i per 31 Des 2020 dan TA 2019 .....	40



# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama Surakarta

Jl. Veteran No. 273 Surakarta - Jawa Tengah 57155

Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643 e-mail : pasurakarta@yahoo.com

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Surakarta, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Bambang Sutiyo, S.H.

NIP. 19830323 198603 1 003

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.8,853,300,822,- dan ada pengembalian Belanja pegawai sebesar Rp.1,366,050 ,- atau mencapai 98.193% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.8,948,682,000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	495,000	0.00	979,999
Belanja Negara	8,948,682,000	8,853,300,822	98,15 %	7,476,482,357

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 4,847,660,- Aset Tetap Rp. 19,547,283,721,- (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. (1,886,547,264 ),- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 12,221,058,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 12,221,058,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 19,539,910,323

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2020	TA 2019	Rp.	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	4,847,660	6,634,486	( 1,786,826)	( 26.93 )
Aset Tetap	19,547,283,721	19,592,037,414	(44,753,693 )	( 0.22 )
Aset Lainnya	0	1,225,055	( 1,225,055 )	( 100.00 )
<b>Jumlah Aset</b>	<b>19,552,131,381</b>	<b>19,599,896,937</b>	<b>( 47,765,556 )</b>	<b>( 0.24 )</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	12,221,058	75,967,599	( 63,746,541 )	( 83.91 )
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>12,221,058</b>	<b>75,967,599</b>	<b>(63,746,541)</b>	<b>( 83.91 )</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	0	0		
Ekuitas Dana Investasi	0	0		
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>19,539,910,325</b>	<b>19,523,929,378</b>	<b>15,980,945</b>	<b>0.08</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>19,539,910,323</b>	<b>19,523,929,378</b>	<b>15,980,945</b>	<b>0.08</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>19,539,910,323</b>	<b>19,599,896,937</b>	<b>( 47,765,556 )</b>	<b>( 0,24 )</b>

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 8,837,347, - sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 8,836,852,387, -) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp. 1,023,715, - dan surplus(defisit) sebesar Rp 0,- sehingga surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 8,837,876,102, -)

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19,523,929,378,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 8,837,876,102,-) dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar senilai (Rp 0,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 8,852,805,822,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp 19,593,910,323,-

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020 nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>A</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.I.1.a	0	495,000	0,00	979,999
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>495,000</b>	<b>0,00</b>	<b>979,999</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.I.1.a	7,554,642,000	7,522,671,583	99.58	6,559,850,919
2.	Belanja Barang	B.I.1.b	1,169,040,000	1,106,191,739	94.62	841,631,438
3.	Belanja Modal	B.I.1.c	225,000,000	224,437,500	99.75	75,000,000
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>8,948,682,000</b>	<b>8,853,300,822</b>	<b>98.93</b>	<b>7,476,482,357</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

### PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	4,847,660	6,634,468
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>4,847,660</b>	<b>6,634,468</b>
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	16,329,654,000	16,329,654,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,040,071,805	1,705,279,305
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	3,050,913,000	3,050,913,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	12,056,180	12,056,180
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1,886,547,264 )	(1,505,865,071 )
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>19,547,283,721</b>	<b>19,592,037,414</b>
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak berujud	C.4. 1.	4,900,220	4,900,220
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.4. 2.	( 4,900,220 )	(3,675,165 )
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>1,225,055</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>19,552,131,381</b>	<b>19,599,896,937</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	12,221,058	75,967,559
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>12,221,058</b>	<b>75,967,559</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>12,221,058</b>	<b>75,967,559</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6		
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>19,539,910,323</b>	<b>19,523,929,378</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>19,522,131,381</b>	<b>19,599,896,937</b>

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



- *LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan Operasional</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D. 1	495,000	979,999
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>495,000</b>	<b>979,999</b>
<b>Beban Operasional</b>			
Beban Pegawai	D. 2	6,626,526,850	6,626,526,850
Beban Persediaan	D. 3	30,756,693	22,751,240
Beban Barang dan Jasa	D. 4	751,704,045	542,963,150
Beban Pemeliharaan	D. 5	257,732,641	204,255,668
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	64,718,200	79,987,158
Beban Penyusutan dan amortisasi	D. 7	271,467,473	238,136,539
Beban penyusutan gedung dan bangunan	D. 8	0	0
Beban Amortisasi Softwer	D. 9	0	0
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>8,837,347,387</b>	<b>7,714,620,605</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(8,836,852,387 )</b>	<b>(7,713,640,606)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D. 10	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D. 11	0	0
<b>Jumlah Surplus/(Desfisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>(0)</b>	<b>0</b>
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>291,535</b>	<b>626,750</b>
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.	1,315,250	64,950
<b>Jumlah Surplus/(Desfisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>( 1,023,715)</b>	<b>561,800</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>( 1,023,715 )</b>	<b>561,800</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus/(Defisit) - LO</b>		<b>(8,837,876,102)</b>	<b>(7,713,078,806)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# **(1) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 Desember 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
Ekuitas Awal	E. 1	19,523,929,378	19,684,780,226
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(8,837,876,102)	(7,713,078,806 )
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar</b>			
<b>Lain-lain</b>			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
<b>Jumlah Lain-lain</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Transaksi Antar Entitas	E. 8	8,852,805,822	7,552,227,958
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>19,539,910,323</b>	<b>19,523,929,378</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

- *CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN*

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

## 1. Penjelasan Umum

---

### 1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman





2. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  - m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

## **Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Surakarta**

---

Visi Pengadilan Agama Surakarta adalah "Terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa berdasarkan putusan yang adil sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan damai". Untuk selanjutnya dari visi Pengadilan Agama Surakarta dituangkan dalam misi Pengadilan Agama Surakarta.

Misi Pengadilan Agama Surakarta adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukkan diri di hukum Islam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Surakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

## **3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### 4. **Basis Akuntansi**

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### 5. **Dasar Pengukuran**

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



## 6. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut:

### a. Pendapatan LRA

---

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### b. Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



### **c. Belanja**

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


### **d. Beban**

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **e. Aset**

---

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
  2. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- 
- 

### **a. Aset Lancar**

---

1. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
3. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
4. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - B.2.1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - B.2.2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - B.2.3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.


### **b. Aset Tetap**

---

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

### **c. Piutang Jangka Panjang**

---

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
- 
- 

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **d. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### **e. Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### f. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### g. Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Sudah dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	A. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan B. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

#### h. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Tabel Masa Manfaat**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

#### **i. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh



penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## (1.) Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### A.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
495,000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 495.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan			0	0,00

Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan dibandingkan TA 2019 .

### A.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja Negara  
: Rp.  
8,853,300,822*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Surakarta per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 8,853,300,822 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 0,00% dari anggaran senilai Rp. 8,946,682,000,-

**Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7,554,642,000	7,522,671,583	99.58
Belanja Barang	1,169,040,000	1,106,191,739	94.62
Belanja Modal	225,000,000	224,437,500	99.75
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4,938,464,000</b>	<b>4,932,229,271</b>	<b>99.87</b>
Pengembalian Belanja		1,471,614	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>8,948,682,000</b>	<b>8,853,300,822</b>	<b>98.15</b>

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2019 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan terdapatnya belanja modal untuk penambahan nilai belanja modal pengadaan Genset.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)
			Rp.
Belanja Pegawai	7,522,671,583	6,559,850,919	962,820,664
Belanja Barang	1,106,191,739	841,631,438	264,560,301
Belanja Modal	224,437,500	75,000,000	149,437,500
<b>Total Belanja</b>	<b>8,853,300,822</b>	<b>7,476,482,357</b>	<b>1,376,818,465</b>

## B. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp.  
7,522,671,583*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Surakarta per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp7,522,671,583 dan Rp. 6,599,850,919. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena :

1. Pembayaran kekurangan kenaikan gaji pegawai tahun 2020 telah terrealisasi
2. Gaji bulan ke 13 pada tahun anggaran 2020 telah terrealisasi

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,295,084,680	1.960,033,120	335,051,560	17,09
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,998	25,996	2,914	11,20
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	163,250,360	149,507,650	13,742,710	9,19
Beban Tunj. Anak PNS	45,874,722	37,733,606	8,141,116	21,57
Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	3,930,655,000	3,541,700,000	389,155,000	10,98
Beban Tunj. PPh PNS	524,087,053	501,610,938	22,476,115	4,48
Beban Tunj. Beras PNS	95,811,660	78,720,540	17,091,120	21,71
Beban Uang Makan PNS	347,935,950	306,975,000	40,960,950	13,34
Beban Tunjangan Umum PNS	17,720,000	9,900,000	7,820,000	78,98
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>7,460,968,335</b>	<b>6,626,526,850</b>	<b>834,441,485</b>	<b>12,59</b>
Pengembalian Belanja	1,366,050	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>7,462,334,385</b>	<b>6,626,526,850</b>	<b>834,441,485</b>	<b>12,59</b>

### C. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp.  
1,106,191,739*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Surakarta per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar 1,106,191,739 dan 841,631,438 Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	529,543,930	421,780,789		

Belanja Barang Non Operasional	0	0		
Belanja Jasa	751,704,045	542,963,150	0	0
Belanja Pemeliharaan	257,732,641	204,255,668	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	64,718,200	79,987,158		
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1,106,191,739</b>	<b>841,631,438</b>		
Pengembalian Belanja	0			
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1,106,191,739</b>	<b>841,631,438</b>		

#### D. Belanja Modal

*Realisasi Belanja Modal :Rp. 224,437,500*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Surakarta per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 224,437,500 dan Rp. 75,000,000

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019 . pada TA 2020 Satker Pengadilan Agama Surakarta terdapat Belanja Modal sebesar Rp 225,000,000,- dan dalam semester II telah teralisasi sebesar Rp. 224,437,500,-

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	
Belanja Modal Peralatan & Mesin	224,437,500	75,000,000	149,437,500	
Belanja Penambahan Modal lainnya	0	0	0	
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>224,437,500</b>	<b>75,000,000</b>	<b>149,437,500</b>	
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>224,437,500</b>	<b>75,000,000</b>	<b>149,437,500</b>	

## V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar: Rp. 4,847,660,-*

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,847,660,- dan Rp. 6,634,468,-. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Surakarta per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 113 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	4,847,660	6,634,468
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>4,847,660</b>	<b>6,634,468</b>

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2017
1	Uang Tunai di Brankas	0	0
2	Kuitansi Uang Persediaan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Des 2020 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Tangan (Petty Cash) sebesar : Rp 0
2. Kuitansi UP yang belum di SP2D kan sebesar : Rp 0

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017
1	Persekot Gaji	0	0
	Jumlah	0	0

### C.1.1. Persediaan

*Persediaan: Rp. 4,847,660*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,847,660 dan Rp. 6,634,468,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16 Rincian Persediaan per 31 Des TA 2019 dan 31 Desember 2018**

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	4,847,660	6,643,468
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0

4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>4,847,660</b>	<b>6,634,468</b>

*Persediaan:  
Rp. 4,847,660,-*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,847,660,- dan Rp. 6,634,468,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :  
Rp.  
19,547,283,721  
,-*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 19,592,037,414,- dan Rp. 19,547,283,721,-. Aset Tetap yang tersaji aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 17 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	16,329,654	16,329,654,000	(16,313,324,346 )
2	Peralatan dan Mesin	2,040,071,805	1,705,279,305	334,792,500
3	Gedung dan Bangunan	3,052,049,000	3,050,913,000	1,136,000
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	12,056,180	12,056,180	0
<b>Jumlah</b>		<b>19,547,283,721</b>	<b>19,592,037,414</b>	<b>(44,753,693 )</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(1,886,547,264 )</b>	<b>( 1,505,865,071 )</b>	<b>( 380,682193 )</b>

Nilai Buku Aset Tetap	19,547,283,721	19,592,037,414	( 44,753,693 )
-----------------------	----------------	----------------	----------------

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.  
16,329,654,000,-*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 16,329,654,000 dan Rp. 16,329,654,000 Tidak ada perubahan nilai aset tetap.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 18 Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	KIB Nomor 1 (Tanah Kantor)	741	8315/79	Pengadilan Agama Surakarta	Tanah Bangunan Tempat Kerja	
2.	KIB Nomor 2 (Tanah Rumah Kantor)	160	4693/83	Pengadilan Agama Surakarta	Tanah Bangunan Perumahan	
<b>Jumlah</b>						<b>16,329,654,000</b>

Per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Surakarta tidak ada pengadaan tanah baru ataupun mutasi masuk maupun keluar berupa tanah yang dapat mengakibatkan mutasi bertambah atau berkurangnya nilai perolehan Aset Tetap.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp.  
2,040,071,805,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,040,071,805 dan Rp. 1,705,279,305,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian 4 Buah Leptop	25,000,000
Pembelian	
Pembelian	
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
-	<b>0</b>



Saldo per 31 Desember 2020	2,040,071,805
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	( 1,886,547,264 )
Nilai Buku 31 Desember 2020	19,547,283,721

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp. 3,052,049,000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 3,052,049,000,- dan Rp. 3,050,913,000,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	
<b>Mutasi Tambah</b>	
-	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>Reklasifikasi Keluar</b>	
Saldo per 31 Desember 2020	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	
Nilai Buku 31 Desember 2020	

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Reklasifikasai Masuk</b>	0
<b>Penambahan Nilai Jaringan</b>	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
-	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp.  
12,056,180*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.056.180 dan Rp. 12,056,180

Per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Surakarta tidak ada penambahan atau pengurangan aset tetap lainnya ataupun mutasi masuk maupun keluar yang dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya nilai perolehan aset tetap lainnya.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
-	0
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
-	0
Saldo per 31 Desember 2020	12,056,180
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	( 1,886,547,264 )
Nilai Buku 31 Desember 2020	12,056,180

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan :  
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp.  
[1,886,547,264 ]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.(1,886,547,264 ) dan Rp.( 1,505,865,071 ).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

4	Aset Tetap Lainnya	12,056,180
	Jumlah	

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,040,071,805		
2	Gedung dan Bangunan	3,052,049,000		
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0

<sup>4</sup>  
Aset Lainnya:  
Rp. 1,225,055

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 1,225,055 Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

**Tabel 20 Rincian Aset Lainnya**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	
1	Aset Lain-lain	0	1,225,055	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0		0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	( 4,900,220 )	( 3,675,165 )	
	Nilai buku Aset Lainnya	4,900,220	3,675,165	0

### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp. 12,221,058

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.12,221,058,- dan Rp. 75,967,559,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember 2020 tercatat

sebesar Rp 12,221,058 yang merupakan utang pihak ketiga yg harus di bayar.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Surakarta per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 121 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Utang Kepada Pihak Ketiga	12,221,058	75,967,550
Uang Muka dari KPPN		0
Jumlah	12,221,058	75,967,559

## C.5. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp.19,539,910,3  
23,-*

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 19,539,910,323,- dan Rp 19,523,929,378,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP : Rp. 0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 22 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 31 Desember TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
3.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
6.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00

7.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
8.		0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai : Rp. 7,460,968,335,-*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.7,460,968,335,- dan Rp.6,626,526,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 23 Rincian Beban Pegawai per 31 Des TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,295,084,680	1,960,033,120	335,051,560	17.09
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,910	25,996	2,914	11,20
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	163,250,360	149,507,650	13,742,710	9.19
Beban Tunj. Anak PNS	45,874,722	37,733,606	8,141,116	21.57
Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	3,930,855,000	3,541,700,000	389,155,000	10.98
Beban Tunj. PPh PNS	542,087,053	501,610,938	220,611,542	4,48
Beban Tunj. Beras PNS	95,811,660	78,720,540	17,091,120	21.71
Beban Uang Makan PNS	347,935,950	306,975,000	40,960,950	13.34
Beban Tunjangan Umum PNS	17,720,000	9,900,000	7,820,000	78,98
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>7,460,968,335</b>	<b>6,626,526,850</b>	<b>834,441,485</b>	<b>12.59</b>

## D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp. 30,756,693*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 30,756,693 dan Rp 22,751,240. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 24 Rincian Beban Persediaan per 31 Des TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	30,756,693	22,751,240	8,005,453	35.18
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>30,756,693</b>	<b>22,751,240</b>	<b>8,005,453</b>	<b>35.18</b>

#### D.4. BebanBarang dan Jasa

*Beban barang dan Jasa : Rp. 751,704,045*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 751,704,045 dan Rp 542,963,150. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 25 Rincian Beban Jasa per 31 Des TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	432,755,492	333,449,950	99,305,542	29.78
Beban Pengiriman surat /pos	927,000	779,000	148,000	18.99
Beban Honor Operasional	36,300,000	36,300,000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	52,211,438	50,484,839	1,726,599	3.42
Beban Barang Penangan Covid	7,350,000	0	7,350,000	0.00
Beban langganan Listrik	82,986,565	97,368,024	(14,381,459)	14.77
Beban Langganan Telepon	1,833,550	2,181,337	( 347,787 )	( 15.94 )

Beban Sewa	137,340,000	22,400,000	114,940,000	513,12
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>751,704,045</b>	<b>542,963,150</b>	<b>208,740,895</b>	<b>38,44</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:  
Rp.  
257,732,641*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 257,732,641 dan Rp. 204,255,668. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 26 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Des TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149,735,000	88,810,000	60,925,000	68.60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107,497,641	115,445,668	( 7,948,027 )	6.88
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	500,000	0	500,000	0.00
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan.	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>257,732,641</b>	<b>204,255,668</b>	<b>53,476,973</b>	<b>26.11</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp.  
64,718,200*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 64,718,200 dan Rp 79,987,158. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	63,918,200	79,987,158	( 14,468,958 )	( 18,45 )
Beban Perjalanan Dinas dlm Kota	800,000	1,600,000	1,600,000	0.00

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>64,718,200</b>	<b>79,987,158</b>	<b>( 15,268,958 )</b>	<b>(19.09)</b>

## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 271,467,473*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 271,467,473 dan Rp 238,136,539. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 28 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	197,108,940	163,811,916	33,297,024	20.32
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73,133,478	73,099,568	33,910	0.04
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0	0
Beban Amortisasi software	1,225,055	1,225,055	0	0.00
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0			
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	271,467,473	238,138,539	33,328,934
---------------------------------------	-------------	-------------	------------

## D.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain  
: Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.9. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional :  
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
<b>Total Surplus(Defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>( 1,023,715 )</b>	<b>561,800</b>	<b>( 1,585,515 )</b>	<b>( 282.80 )</b>

## D.10. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 0

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :* Nilai ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing  
*Rp.* sebesar Rp. 19,523,929,378 dan Rp.19,684,780,226  
*19,684,780,226*

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah  
*LO :* sebesar Rp( 8,837,876,102 ) dan Rp 7,731,078,806 ) Defisit LO merupakan selisih kurang  
*Rp.(8,837,876,102)* antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena  
*Persediaan : Rp.* kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai  
*0* persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

### E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset* Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan  
*Tetap : Rp.* kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

### E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset* Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada  
*Beban : Rp.0* periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

### E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas* Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang  
*Pendapatan :* terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas  
*Rp.* Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah



masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 .

## **E.7. Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir :* Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah  
*Rp.*  
*19,523,929,378* masing-masing sebesar Rp 19,539,910,323 dan Rp 19,523,929,378,-

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Kejadian penting setelah tanggal neraca adalah peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi diantara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

---

Dalam Semester II tahun anggaran 2020 tidak ada pemeriksaan BPK sehingga tidak ada pengungkapan tentang temuan BPK terhadap Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua**

---

Per 31 Desember 2020 tidak ada pengungkapan Informasi Pendapatan dan Neraca Akrua dan akan diungkapkan pada laporan keuangan semester II tahun anggaran 2020.

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang dipergunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Surakarta adalah : PT. BRI Kantor Cabang Solo Sudirman dan telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta berdasarkan surat persetujuan nomor S-259/WPB.14/KP.028/2017 tanggal 18 Maret 2017. Adapun nomor rekening A/C 0097-01-00847-30-6 dan nama rekening BPG 028 PENGADILAN AGAMA yang dipergunakan sebagai penampungan belanja negara untuk DIPA 01 ( Eselon I : Badan Urusan Administrasi dengan Kode Satker : 401180). Saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,-

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

---

Per 31 Desember 2020 telah dilakukan Revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi ke 01 yang merupakan Revisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 02 Juli 2020 dalam halaman III DIPA.
2. Revisi ke 02 yang merupakan Revisi Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 05 Nopember 2020 dalam halaman III DIPA.
3. Revisi ke 03 yang merupakan Revisi Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 30 Nopember 2020 yaitu dalam halaman III DIPA .
4. Revisi ke 04 yang merupakan Revisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Desember 2020. Revisi tersebut merupakan revisi Administrasi yaitu revisi rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.

#### **F.2.5. Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB**

---

Per 31 Desember 2020 tidak ada ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB, sehingga tidak ada informasi mengenai ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB dalam laporan keuangan ini.

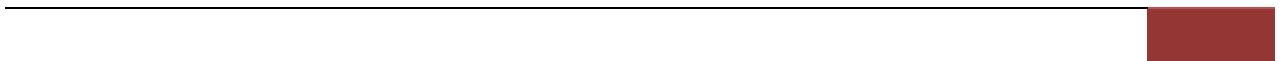
#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

Pengajuan pengembalian kelebihan setor pada akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5,640,00,- yang telah diajukan sesuai dengan prosedur sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per – 69/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran telah terealisasi pada tanggal 31 Desember 2020. Kelebihan setor pada tahun 2020 disebabkan sebagai berikut :

Jumlah Uang Persediaan pada Satker Pengadilan Agama Surakarta tahun anggaran untuk DIPA 01 ( Kode Satker : 401180 ) sebesar Rp 50.000.000,-. Pada akhir tahun anggaran perhitungan pengajuan GU Nihil dan Pengembalian Setoran Sisa UP telah diperhitungkan masing-masing untuk GU Nihil sebesar Rp 0, dan untuk Setoran Sisa UP sebesar Rp 5,640,00 ,-. Setoran Sisa UP telah disetorkan dengan SSBP (81511) pada tanggal 30 Desember 2020.

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*



**Pengadilan Agama Surakarta**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1,553,553,705</b>	<b>99,450,000</b>	
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	421.476.734	230.917.344	190.559.390
2.	Alat Pengolahan	4	0	0	0
3.	Alat Kantor	5	71.398.000	59.505.400	11.892.600
4.	Alat Rumah Tangga	5	300.479.000	239.740.600	60.738.400
5.	Alat Komunikasi	5	6.675.000	6.375.000	300.000
6.	Unit Alat Laboratorium	8	0	0	0
7.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15	0	0	0
8.	Alat Khusus Kepolisian	4	0	0	0
9.	Komputer Unit	4	181.525.000	174.405.000	7.120.000
10.	Peralatan Komputer	4	21.735.000	21.735.000	0
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>2.758.316.100</b>	<b>331.113.462</b>	<b>2.427.202.638</b>
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2.724.896.100	326.987.532	2.397.908.568
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	33.420.000	4.125.930	29.294.070
<b>C.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		<b>130.519.400</b>	<b>15.912.172</b>	<b>114.607.228</b>
1.	Bangunan Air Irigasi	50	130.519.400	15.912.172	114.607.228
<b>D.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>12,056,180</b>	<b>12,056,180</b>	
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	5.920.080	0	5.920.080
2.	Barang Bercorak Kesenian	4	5.400.000	5.400.000	0
<b>E.</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0
2.	Alat Kantor	5	0	0	0
3.	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0
4.	Komputer Unit	4	0	0	0
5.	Peralatan Komputer	4	0	0	0
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		<b>6.655.184.314</b>	<b>1.085.103.978</b>	<b>5.570.080.336</b>
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset</b>		<b>6.655.184.314</b>	<b>1.085.103.978</b>	<b>5.570.080.336</b>

## *B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL*